

KONFLIK PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN BANDARA KUALANAMU

Septy Denso Damanik

Alumni Prodi. Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Unimed

Waston Malau

Staf Pengajar di Prodi. Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

wastonmalau@unimed.ac.id

Abstrak

Artikel ini hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kehidupan penduduk sebelum pembangunan bandara, mengetahui waktu peralihan lahan penduduk menjadi proyek pembangunan bandara Kualanamu, mengetahui respon penduduk terhadap peralihan proyek, mengetahui bentuk konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemilik proyek pembangunan bandara. Data tersebut diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini telah diketahui bahwa ganti rugi lahan tanah yang menjadi timbal balik kesepakatan antara pihak perusahaan pembangunan bandara dengan masyarakat desa tidak setimpal dengan apa yang mereka terima dan tidak merata dalam proses ganti rugi tanah tersebut. Beberapa dari penduduk tersebut mengalami dampak dari adanya pembangunan bandara kualanamu. Dari konflik pembebasan tanah warga mengenai ganti rugi lahan tanah serta lahan tanah yang tidak dijual warga karena hasil warisan orangtua dan perbedaan harga tanah yang tidak bersertifikat dan yang bersertifikat yang menimbulkan permasalahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan pembangunan bandara, diantaranya terdapat beberapa warga yang terkena dampak pembangunan bandara dan penduduk yang masih bertahan di areal pembangunan bandara tersebut sekaligus menjadi informan kunci yang akan di angkat dalam penelitian, Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya dampak positif maupun dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat. Adapun dampak negatif dari pembangunan bandara yaitu berkurangnya lahan warga untuk bertani demi melangsungkan kehidupan tiap – tiap warga tersebut, hilangnya sebagian mata pencaharian warga dan menurunnya penghasilan masyarakat. Dampak positif dari pembangunan bandara tersebut antara lain perluasan jaringan jalan menuju bandara , perbaikan jalan di desa beringin pasar VI Kualanamu.

Kata Kunci: *Pembangunan, Tanah, Konflik*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraria yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan akan sumber agraria tersebut termasuk tanah yang menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Dari sekian banyak jumlah penduduk Indonesia, hampir 70% menggantungkan kehidupan mereka di lapangan pertanian dengan menjadi petani dan tinggal di pedesaan. Tanah sebagai alat produksi menjadi sumber yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup petani untuk mengembangkan kehidupan sosial serta kebudayaan secara lebih luas. Masalah tanah tidak semata-mata merupakan masalah hubungan antara manusia dengan tanah, tetapi lebih dari itu, secara normatif (juga kepentingan analisis) merupakan hubungan manusia dengan manusia.

Bagi kaum tani dan masyarakat pedesaan, tanah mempunyai arti yang sangat penting sehingga perlu dijamin perlindungannya. Tanah atau sumber daya agraria lainnya dalam suatu masyarakat agraria tidak hanya menjadi salah satu faktor produksi, tetapi juga mempunyai arti penting lainnya baik menyangkut aspek sosial maupun politik. Dalam pembahasan klasik tentang

karakter politik petani, para ahli pada umumnya menempatkan petani dilihat sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam posisi tersubordinasi atau sebagai masyarakat pinggiran yang terus-menerus didominasi oleh kekuasaan negara. Sebaliknya, negara dikenal berada dalam posisi paling atas dengan segala kekuasaan yang terpusat padanya (Sukidin, 2003).

Pembangunan merupakan suatu usaha melakukan perubahan terhadap keadaan untuk menjadi lebih baik, dimana usaha tersebut dilakukan secara terus- menerus, Pembangunan sering membawa dampak sampingan yang biasanya berupa gejolak dalam masyarakat, misalnya perubahan nilai, kepentingan, atau perubahan lembaga dari yang lama diganti dengan yang baru.

Akar dari pembangunan nasional adalah pembangunan daerah, apabila pembangunan daerah dilaksanakan dengan baik maka tujuan dari pembangunan nasional akan tercapai. Sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Indonesia maka pemerintah menjalankan pembangunan bandara yang akan direncanakan menjadi salah satu bandara terbesar di Asia Tenggara. Kawasan kualanamu merupakan kawasan yang berada di Sumatra Utara yang menjadi salah satu

tempat pembangunan proyek bandara baru yang telah lama direncanakan setelah keberadaan bandara Polonia.

Lokasi pembangunan bandara tersebut merupakan bekas areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, yang terletak di Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Bandara Internasional Kualanamu diresmikan pada tanggal 25 Juli 2013 yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, tampak kokoh dan megah saat menerima dan memberangkatkan penerbangan Pertama. Bandara Kualanamu sendiri telah lama diharapkan menjadi bandara pengganti dari bandara Polonia Medan yang telah dimakan usia dan kemampuan penerimaan penumpangnya. Pembangunan Bandara Kualanamu digagas saat kepemimpinan Presiden Soeharto, akan tetapi tidak berjalan dengan mulus akibat gejolak perekonomian ditahun 1998 dan kurangnya perhatian pemerintahan terhadap rancangan pembangunan bandara tersebut.

Saat ini telah diketahui bahwa bandar udara Internasional Kualanamu sudah beroperasi secara aktif dan menerima tamu perdananya saat uji coba (*soft operation*) pada 25 Juli 2013. Banyak kontroversi terjadi pada pembangunan bandar udara Internasional Kualanamu ini, mulai dari nama bandara yang jadi sumber keributan para anggota dewan, pengoperasiannya yang molor karena tidak sesuai dengan rencana awal yaitu Maret-April 2013, pemindahan para pedagang buku dari lapangan merdeka ke tempat yang dinilai kurang tepat, kesiapan kereta api sebagai transportasi menuju bandara yang masih setengah hati, hingga akhirnya kesiapan jalan tol ataupun arteri menuju bandara yang masih carut-marut karena belum sepenuhnya pemberian ganti rugi tanah rakyat untuk pembangunan jalan tol dan jalan arteri.

Pembangunan bandara Kualanamu tersebut merupakan lokasi kawasan pemukiman penduduk yang mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Pertanian warga yang telah digusur dan pembangunan yang berskala Internasional yang membutuhkan lahan hingga ribuan hektar menyebabkan masyarakat yang biasa bertani dan yang menjadi buruh tani terpaksa harus menyesuaikan diri dengan apa yang bisa diolah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pelaksana PT. Angkasa Pura II membebaskan tanah mereka dengan harga yang cukup tinggi, namun saat ini terdapat 15 Kepala Keluarga masyarakat Desa Pasar V Kuala Namu yang masih bertahan di dalam kawasan areal pembangunan bandara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Konflik Pembebasan Tanah Dalam Pembangunan Bandara Kualanamu*

(*Studi Deskriptif di Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Pembebasan Tanah

Pembangunan bandara sangatlah menguntungkan bagi masyarakat, pembangunan bandara ini merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan pada transportasi udara (bandara) yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, yang memiliki peran yang lebih luas bukan sekedar tempat pemberhentian pesawat udara dapat mendarat untuk menurunkan atau mengangkat penumpang dan barang, mengadakan perbaikan atau mengisi bahan bakar.

Akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih luas dan fasilitas-fasilitas yang baik agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah sekitarnya. Begitu juga dengan bandara Kualanamu yang dibangun sangat efisien agar dapat meningkatkan fungsi bandara dan memberikan fasilitas-fasilitas yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat.

Namun dengan adanya pembangunan bandara kualanamu tersebut juga menimbulkan konflik antara masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara dengan pihak perusahaan pembangunan bandara itu sendiri. Dalam analisis data di dalam hal ini akan jelas diuraikan bagaimana bentuk Konflik Pembebasan Lahan Tanah di dalam proses pembangunan Bandara Kualanamu pada masyarakat Desa Beringin Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang. Dalam pembahasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kondisi ataupun keadaan masyarakat Desa Beringin Pasar VI Kualanamu pada proses pembangunan Bandara Kualanamu sehingga terjadi konflik pembebasan lahan tanah pada desa tersebut.

Konflik pembebasan tanah yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan ganti rugi diantara masyarakat yang memiliki lahan tanah di desa pasar VI Kualanamu, sebagian besar warga desa tersebut karyawan perkebunanlah yang telah mengesahkan tanahnya untuk di jual kepada pihak perusahaan pembangunan. Banyaknya warga di desa pasar VI Kualanamu yang terdiri dari 665 warga penduduk, dari sekian penduduk tersebut 169 KK yang terkena dampak pembangunan bandara tersebut, dari 169 KK yang menjadi persoalan pembebasan lahan yang terus terjadi konflik yaitu tinggal 15 KK lagi yang masih bertahan terhadap lahan tanahnya yang menjadi incaran para pihak perusahaan untuk terus memperluas areal pembangunan.

Pembangunan tahapan 2 dua bandara kualanamu sekarang telah diproses, yaitu memperluas jaringan jalan dan membangun jalan layang untuk alur laju menuju

bandara tersebut. Adapun yang menjadi informan yaitu warga yang telah mengesahkan ganti rugi tanah milik pribadi didalam penelitian ini terdiri dari 2 kk yaitu : Bapak Mulyadi (47) tahun dan Bapak Kasmin (50) tahun tinggal di dusun II desa pasar VI Kualanamu.

Salah satu narasumber warga Desa Beringin Pasar VI Kualanamu yaitu Bapak Mulyadi dusun II. Persoalan ganti rugi inilah yang sebenarnya menjadi topik muara dari konflik pembebasan tanah pasca pembangunan bandara kualanamu, bapak mulyadi yang bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki tiga orang anak, dua lelaki dan satu perempuan dan satu orang istri yang bekerja sebagai pedagang.

Bapak Mulyadi sendiri yang terkena akibat adanya sistem pembangunan bandara Kualanamu yang menjadi akar permasalahan pembebasan tanah tersebut. Tanah yang dimiliki bapak Mulyadi ini adalah tanah warisan orangtua yang diberikan dari garis keturunan bapak Mulyadi hingga 4 generasi lamanya, yang dulunya bekas tanah perjuangan nenek moyang warga Desa Beringin Pasar VI Kualanamu, bapak Mulyadi memanfaatkan tanah tersebut sebagai mata pencaharian keluarga mereka beserta keluarga besar bapak mulyadi yang turut serta dalam pemanfaatan di tanah bekas warisan dari garis keturunan nenek moyang mereka. Tanah bapak Mulyadi seluas 1 Hektar milik pribadi keluarga dari keturunan Bapak mulyadi tersebut.

Tanah bapak Mulyadi tersebut tidak memiliki surat tanah, hanya memiliki surat pembuktian hak milik tanah berdasarkan surat keterangan dari Kantor Camat Beringin. Proses ganti rugi itu dilakukan di rumah bapak Mulyadi dan para tim panitia mengunjungi kediaman bapak Mulyadi beserta keluarga.

Upaya nyata yang telah terbukti khusus pada karyawan perkebunan PTPN II Tanjung Morawa ialah adanya pembangunan rumah karyawan yang baru pengganti perumahan lama yang mereka tempati, dan ganti rugi berupa uang kepada bapak Kasmin tersebut dan dari keterangan yang diperoleh dari bapak Kasmin tersebut perbedaan harga tanah tersebut tergantung dengan letak, tempat tanah yang strategis apabila memiliki sertifikat tanah harga tanah tersebut akan lebih mahal dibandingkan harga tanah yang tidak memiliki sertifikat tanah.

Seperti yang dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa masyarakat Desa Beringin Pasar VI Kualanamu yang masih bertahan sebanyak 15 warga kepala keluarga dalam pembebasan tanah masyarakat yang terkena penggusuran lahan tanah terhadap pembangunan bandara Kualanamu. Pengumpulan data akurat dari permasalahan yang akan diteliti melalui observasi dan peninjauan lokasi langsung ke daerah tersebut antara lain memperoleh data dengan cara

wawancara langsung kepada warga Desa Pasar VI Kualanamu sekaligus sebagai narasumber akan permasalahan yang ada pada konflik pembebasan lahan tanah dalam pembangunan bandara Kualanamu serta memperoleh data ataupun gambar lokasi penelitian yang menjadi sumber informasi dalam bentuk dokumentasi hasil penelitian di Desa Beringin Pasar VI Kualanamu. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui dari beberapa data yang telah diperoleh dari beberapa informan sebagai berikut:

Konflik I “Ganti Rugi”

Rantan, Ngateni, Kasiman, Suriani, Airani, Suwarno, Kemat, Adi Suganda dan Juliati yang menjadi informan dalam konflik pembebasan tanah yang berada di Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Masing – masing informan tersebut memiliki latar belakang hidup yang sama yang berprofesikan sebagai petani. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari 15 KK yang mengalami konflik 10 KK diantaranya yaitu: Bapak Rantan, 51 tahun, memiliki tanah seluas 10 Ha sawah dan ladang yang dimiliki bapak Rantan tersebut, ibu Ngateni, 48 tahun, dan memiliki tanah seluas 2 Ha ladang milik pribadi keluarga ibu Ngateni, Kasiman (58) tahun dan memiliki tanah seluas 13.510 m² ladang milik pribadi bapak Kasiman, Suriani, 55 tahun, memiliki tanah seluas 9.200 m² ladang milik pribadi ibu Suriani dan keluarganya. Airani, 49 tahun, memiliki tanah seluas 11.100 m² ladang milik pribadi ibu suriani dan keluarga. Suwarno, 57 tahun, memiliki tanah seluas 2 Ha berupa sawah. Bapak Kemat, 51 tahun, memiliki tanah seluas 11.230 m² ladang, Adi, 40 tahun, memiliki ladang seluas 3.750 m². Suganda, 47 tahun, memiliki tanah seluas 1 Ha berupa ladang. Juliati, 38 tahun, memiliki tanah seluas 1 ha ladang berupa ladang.

Peralihan tanah terhadap proses pembangunan bandara menjadi penyebab timbulnya berbagai konflik bagi kalangan masyarakat. Kepentingan pembangunan biasanya diidentikkan dengan kepentingan umum. Disini dikatakan dengan jelas oleh 10 kk yang terlibat dalam pembebasan tanah itu, permasalahan yang mereka hadapi cukup rumit, dimana lahan tanah sebagai mata pencaharian akan dialih fungsikan untuk kepentingan pembangunan bandara Kualanamu yang masih terus berproses, dalam pembangunan bandara tahapan kedua, yaitu seperti jalan layang, dan pembangunan lainnya yang telah direncanakan oleh pihak perusahaan tersebut.

Tanah milik pribadi dari masing-masing 10 kk ini tidak memiliki sertifikat tanah dari BPN, dan tanah pribadi yang mereka miliki merupakan tanah warisan dari orang tua dan tanah yang dibeli sebelumnya, seperti bapak Kasiman, ibu Ariani dan bapak Kemat mereka membeli tanah yang sekarang tanah itu menjadi milik

pribadi, sedangkan 7 kk lainnya merupakan tanah hasil warisan orangtua yang dititip kepada masing-masing keluarga tersebut. Sehari-harinya keluarga mereka memanfaatkan dan mengolah tanah mereka masing-masing guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat 10 kk yang tinggal di desa pasar VI Kualanamu mengalami hal yang sama dengan masyarakat lainnya, hanya saja dari 10 kk tersebut masih mempertahankan lahan tanah yang mereka miliki dan tidak ingin tanah mereka di jual oleh pihak perusahaan pembangunan. Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya konflik tersebut karena tidak sesuainya jaminan akan ganti rugi tanah yang dialih fungsikan dalam proses pembangunan.

Konflik 2 “Konflik Penyerobotan Atas Tanah”

Dedi, Resman, Supriadi, Trisnawati dan Suprianto menjadi informan dalam kelengkapan data peneliti dalam konflik pembebasan tanah dalam pembangunan bandara, adapun kelima informan tersebut merupakan bagian 15 KK yang akan diteliti keberadaannya, antara lain: Dedi, 42 tahun, memiliki tanah seluas 2 Ha tanah milik pribadi dan memiliki sertifikat tanah; Resman, 50 tahun, memiliki tanah seluas 1 Ha milik pribadi; Supriadi, 52 tahun, memiliki tanah seluas 3 Ha milik pribadi; Trisnawati, 38 tahun, memiliki tanah seluas 2 Ha milik pribadi dan keluarga; Suprianto (43) tahun dan memiliki luas tanah 4 ha milik pribadi.

Proses peralihan tanah terhadap pembangunan masih terus berlanjut hingga saat ini, banyak perluasan pembangunan akan segera diproses. Akan tetapi peralihan tanah dalam proses pembangunan yang menjadi perdebatan antara masyarakat pemilik tanah dengan perusahaan pembangunan tersebut. Konflik pembebasan tanah ini juga terjadi pada 5 kk yang berada di desa pasar VI Kualanamu antara lain dengan bapak Dedi, bapak Resman, bapak Supriadi, ibu Trisnawati dan bapak Suprianto.

Masing – masing dari penjelasan 5 kk tersebut menyatakan hal yang sama antara satu keluarga dengan keluarga lainnya yaitutanah mereka tidak untuk dijual. Berbagai rangkaian permasalahan dijelaskan oleh informan yang telah dilakukan peneliti, seperti hal yang disampaikan oleh bapak Dedi, bapak Resman dan ibu Trisnawati, disini mereka menjelaskan bahwa tanah yang mereka punya bukan untuk dijual dan sumber mata pencaharian keluarga mereka lebih besar itu dari hasil bertani dan bercocok tanam.

Dampak Positif Pembangunan Bandara

Dari hasil keterangan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Pasar VI Kualanamu, terdapat dampak positif dari proyek pembangunan bandara Kualanamu, antara lain seperti bertambahnya jaringan jalan, jaringan jalan layang, perbaikan jalan menuju Desa Beringin Pasar VI Kualanamu khususnya, serta menambahnya lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi sebagian masyarakat. Berikut ini dampak pembangunan bandara terhadap infrastruktur meskipun penjelasannya secara jelas dan singkat antara lain penambahan jaringan jalan, perbaikan jalan dan permukiman penduduk.

1. Penambahan jaringan jalan

Jalan sebagai sarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang juga mendapat perhatian dari pihak pelaksana pembangunan bandara, maka sampai saat ini jaringan jalan sudah semakin lebih baik dan lebih banyak, terutama pada jalur menuju bandara Kualanamu tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah :



2. Perbaikan Jaringan Jalan

Selain pertambahan jaringan jalan, perbaikan jalan juga dilakukan, adapun tujuannya untuk Gambar 1. Jaringan Jalan Jalur menuju Bandara Kualanamu

melancarkan segala kegiatan yang dilakukan baik untuk kepentingan pembangunan bandara maupun untuk masyarakat yang juga merasakan terkait dampak perbaikan jalan tersebut. Perbaikan jalan di Desa Beringin Pasar VI Kualanamu ini mencapai 1 km dengan menaburkan sekitar 470 ton material *bace coase* dengan tujuan untuk meminimalisir tingkat populasi debu. Berikut dibawah ini gambar yang melihatkan perbaikan jalan di Desa Beringin Pasar VI Kualanamu:

Berdasarkan gambar tersebut, perbaikan jaringan jalan di Desa Beringin Pasar VI Kualanamu dapat ditarik kesimpulan dampak positif pembangunan bandara berjalan dengan baik dari mulai tahap pembangunan awal sampai sekarang yang hampir selesai berjalan sesuai rencana dan bekerja dengan maksimal.



Gambar 2. Perbaikan Jalan Desa Beringin Pasar VI Kualanamu

3. **Pertambahan Permukiman Penduduk**
Permukiman penduduk juga mengalami perubahan sebab dikarenakan masyarakat pendatang juga memerlukan tempat tinggal baik yang berupa rumah, kos-kosan, mess ataupun rumah yang memang sudah permanen untuk orang yang merencanakan tinggal lebih lama atau pun menetap selama di desa itu. Salah satunya pekerja yang bekerja di pembangunan bandara tersebut. Selain itu ada juga masyarakat yang pindah dari Desa Beringin Pasar VI Kualanamu ke desa lainnya disekitar keberadaan bandara kualanamu, hal ini terjadi karena terambilnya tanah masyarakat dalam pembangunan bandara. 11 informan yang menjawab ya, dan sebanyak 4 orang informan yang menjawab tidak.



Gambar 3. Perbaikan Jalan Desa Beringin Pasar VI Kualanamu

Dampak Negatif Pembangunan Bandara

Dampak negatif dari pembangunan bandara yaitu berkurangnya lahan pertanian masyarakat, dan banyaknya lahan permukiman masyarakat yang terambil didalam pembangunan bandara, khususnya pada dusun 3 Desa Beringin Pasar VI Kualanamu, serta hilangnya pekerjaan dan berkirangnya pendapatan masyarakat khususnya dibidang pertanian. Pembangunan bandara sangatlah menguntungkan bagi masyarakat, pembangunan bandara ini merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan pada transportasi udara (bandara) yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, yang memiliki peran yang lebih luas akan bukan sekedar tempat pemberhentian pesawat udara dapat mendarat untuk menurunkan atau mengangkut penumpang dan barang, mengadakan perbaikan atau mengisi bahan bakar. Akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih luas dan fasilitas-fasilitas yang baik agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah sekitarnya.

Begitu juga dengan bandara Kualanamu yang dibangun lebih efisien disertai dengan teknologi yang canggih agar dapat meningkatkan fungsi bandara dan memberikan fasilitas-fasilitas yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil rangkaian penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan data yang diproses dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun kehidupan warga desa pasar VI Kualanamu mayoritas petani dan buruh tani, dan penduduk desa pasar VI tinggal sudah hampir tiga sampai empat generasi di daerah itu sendiri.
2. Peralihan lahan tanah penduduk terjadi pada saat proses pembangunan bandara berlangsung.
3. Berbagai respon – respon terlontar pada warga setempat dikarenakan peralihan tanah warga, sebagian warga merasa tidak puas akan ganti rugi lahan tanah yang berbeda-beda yang ditetapkan oleh pihak perusahaan tersebut
4. Persoalan pembebasan tanah dalam pembangunan bandara kualanamu memang sejak awalnya telah terjadi konflik diantara masyarakat Desa beringin Pasar VI Kualanamu dan berdampak pada kehidupan masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
5. Pembangunan bandara Kualanamu ini telah mengambil lahan banyak hingga ribuan hektar tanah bekas areal perkebunan PTPN II Tanjung Morawa,

Oleh sebab itu sebagian besar tanah tersebut milik warga Desa Beringin Pasar VI Kualanamu.

6. Di dalam proses pembangunan bandara Kualanamu tersebut pihak perusahaan pembangunan bandara dalam mengatasi persoalan ganti rugi tanah milik masyarakat Desa Beringin Pasar VI Kualanamu belum sepenuhnya total dan merata dalam hal ganti rugi tanah warga tersebut. Masih ada beberapa warga yang tidak menerima hak mereka dengan perjanjian yang telah ditetapkan dari awal.
7. Perbedaan harga tanah yang memiliki sertifikat dan tidak memiliki sertifikat yang menjadi patokan murah ataupun mahal nya tanah tersebut disertai dengan letak strategis tanah yang dimiliki warga tersebut.
8. Tanah milik warga yang tidak dijual menjadi salah satu muara timbulnya sebuah konflik dari sebagian warga desa pasar VI Kualanamu, dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah sengketa dan tanah warisan yang diturunkan oleh masing – masing peninggalan orang tua warga tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., 1983. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Arnit, W. H., 1988. *Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES.
- Bagus, I., 2008. *Duta Graha Incar Proyek Kualanamu*. [Online] [Accessed 30 November 2010].
- Budiono, H., 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-Asa Urgati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Gautama, S., 2001. *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung: 2001.
- Lemhanas, 1997. *Pembangunan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, L. J., 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Perhubungan, D., n.d. *Pembangunan Bandara Udara Baru Medan, New Medan Airport*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Satuan Kerja Direktorat Teknik Bandar Udara.
- Raho, B., 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.